

Strategi pembinaan kader politik melalui literasi politik

Asep Hendrik^{a,1*}, Endang Danial^{a,2}

^a Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia

¹ asephendrik2@gmail.com ² endangdanial@upi.edu

*Korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:

09-08-2021

Disetujui:

04-10-2021

Kata kunci:

Kader Politik
Literasi Politik
Partai Politik

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis tentang urgensi pembinaan kader politik melalui literasi politik yang dilakukan oleh partai GOLKAR Kabupaten Cianjur dalam membina kader politiknya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan metode penelitian menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi bahwa temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa urgensi pembinaan kader politik melalui literasi politik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kader partai. Kompetensi tersebut sebagai modal dasar kader politik untuk berkontestasi di pagelaran pemilihan umum.

ABSTRACT

Development of political cadres through political literacy. *The purpose of this study is to explore, study, and analyze the urgency of fostering political cadres through political literacy conducted by the GOLKAR Cianjur regency party in fostering political cadres. The research approach used in this study is a qualitative approach while the research method used case studies. Data collection techniques using interviews, observation, study documentation and study literature. Data analysis includes data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The findings of this study generally reveal that the urgency of fostering political cadres through political literacy is to improve the competence of party cadres. The competency is the basic capital for political cadres to contest in the general election.*

Received:

09-08-2021

Accepted:

04-10-2021

Keywords:

Political Cadres
Political Literacy
Political Parties

Copyright © 2021 (Asep Hendrik & Endang Danial). All Rights Reserved

How to Cite: Hendrik, A. & Danial, E. (2021). Strategi Pembinaan Kader Politik Melalui Literasi Politik. *Jurnal Mimbar Demokrasi*, 21 (1), 41-47. DOI: <http://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22399>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The author (s) holds the copyright.

Pendahuluan

Di kala membahas perihal dinamika politik di suatu negara tidak akan terlepas dari eksistensi partai politik di dalamnya dengan berbagai platform yang ditawarkan. Platform tersebut adalah ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh partai yang berfungsi untuk menarik simpati masyarakat agar pemikiran dan sikap masyarakat dapat sejalan dan seirama dengan partai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki sebuah orientasi tertentu, di mana orientasi tersebut tidak lain untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan negara yang tidak hanya sebatas kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh

karena itu, maka masyarakat dapat turut berpartisipasi aktif secara langsung untuk menyampaikan ide-ide maupun gagasan-gagasan ihwal pengelolaan negara kepada para kader partai politik.

Mengkaji partai politik menjadi bahasan menarik tersendiri yang senantiasa diajukan, sebab menjelang pemilihan umum partai politik biasanya bermanuver untuk menarik simpati dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dengan menampilkan visi misi dan tujuan partai politik yang disampaikan oleh kader partai secara transparan kepada masyarakat dengan berbagai macam strategi penyampaiannya. Misalnya, dalam bentuk sosialisasi program, baliho, poster, brosur,

video, media sosial dan sebagainya yang lengkap dengan foto pimpinan partai maupun kader politik yang diusung.

Keberadaan partai politik di negara demokrasi sangat "...dibutuhkan oleh suatu negara, karena partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara" (Budiardjo, 2008, hlm. 397). Di Indonesia sendiri partai politik tumbuh subur dengan berbagai *platform* yang ditampilkan sehingga partai politik dapat "... menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa" (Rosit dan Hidayat, 2019, hlm. 179).

Partai politik memiliki salah satu fungsi strategis, yaitu kaderisasi atau rekrutmen politik selain fungsi-fungsi lain, misalnya komunikasi politik dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kaderisasi sebagai suatu proses seleksi kader politik yang nantinya akan menjadi calon pemimpin yang diusulkan oleh partai dalam pemilihan umum. Proses seleksi kader yang dilakukan oleh partai politik akan menjadi parameter tercapai atau tidaknya sistem politik yang telah dibangun yang berdampak pada kualitas proses kaderisasi tersebut. Menurut Heryanto (2011, hlm. 46) bahwa kaderisasi "... sangat penting bagi kelangsungan sistem politik karena tanpa elit politik yang mampu melaksanakan peranannya maka kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Kaderisasi pada esensinya adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan", sebab individu-individu yang akan menjadi kader partai tersebut "... memiliki kewajiban dan tugas untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan politik" (Septiawan dan Winarno, 2017, hlm. 119).

Dalam perihal rekrutmen kader partai saat ini tidak sedikit kekhawatiran muncul terhadap sistem rekrutmen yang diterapkan oleh partai politik. Asas keterbukaan dan transparan dalam rekrutmen kader partai seolah tidak dijalankan sehingga berdampak kepada penyeleksian kader politik yang kurang objektif. Bahkan sebagian partai politik "...mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite parpol itu sendiri, sehingga cenderung berlangsung tertutup, eksklusif, dan nepotisme. Meskipun ada prosedur formal yang dimiliki parpol dalam proses rekrutmen, namun

dalam realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh pimpinan parpol" (Haris, dkk, 2016, hlm. 40). Keberperanan masyarakat sebagai pengawas jalannya proses seleksi kader politik yang dilakukan oleh suatu partai politik menjadi tidak terlihat. Apabila merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 terutama dalam pasal 29 ayat (2) yang berkaitan dengan rekrutmen politik bahwa "rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan". Hal tersebut dilakukan agar kader-kader yang dimiliki oleh partai politik tidak terkesan instan, dalam artian kader politik yang kurang berkualitas dari segi *capability*, *integrity*, dan *leadership* sebagai kader partai, karena tidak melalui proses mekanisme pembinaan kader melalui literasi politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada problematika kaderisasi kader politik di atas, maka muncul kekhawatiran dalam benak pikiran masyarakat bahwa partai politik hanya menjadi kendaraan politik oleh sebagian individu untuk sebatas meraih kekuasaan sehingga dapat mereduksi arti penting keberadaan partai politik itu sendiri. Keadaan partai politik di negara demokrasi saat ini yang awalnya menjadi penggerak ide dan gagasan baru serta menampung aspirasi masyarakat dalam rangka mendukung kemakmuran rakyat, kini telah bergeser menjadi arena kompetisi kader politik untuk memperoleh kedudukan. Partai politik yang seharusnya menjadi tumpuan harapan lahirnya pemimpin-pemimpin negara yang berkualitas telah berganti menjadi arena kompetisi kalangan eksternal untuk menunggu dipinang serta dicalonkan untuk menduduki jabatan legislatif atau eksekutif, maka bukan merupakan sebuah persoalan yang mengherankan ketika publik memandang negatif terhadap kinerja partai politik.

Nyatanya orientasi partai politik hanya berhenti pada level memperoleh kekuasaan, padahal tidak demikian, partai politik mestinya menggunakan kekuasaan yang telah diperoleh tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Kondisi demikian mengakibatkan keinginan partai politik untuk terus berkuasa yang dominan, bukan semangat pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain adanya sekat antara partai politik dengan masyarakat sehingga menimbulkan jarak atau kesenjangan. Jarak yang begitu lebar akan membuat masyarakat berpikir bahwa mereka bisa

hidup tanpa adanya peran aktif dari partai politik. Kekecewaan yang mendalam tersebut telah membuat masyarakat merasa tidak pernah diperhatikan dan diurus oleh partai politik, terutama pasca pesta demokrasi selesai. Persoalan tersebut tentu akan berdampak kepada menurunnya angka partisipasi politik masyarakat, terutama partisipasi politik dari kalangan generasi muda yang nantinya sebagai cerminan meningkatnya jumlah golput. Belum lagi dengan adanya kader partai politik yang melakukan tindakan melanggar hukum.

Dengan citra partai politik tersebut, seharusnya partai politik berbenah untuk mengembalikan fungsi partai politik sesungguhnya. Apabila merujuk kepada fungsi partai politik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 pasal 11 tahun 2011 tentang fungsi partai politik bahwa partai politik mengemban beberapa fungsi, sebagai berikut:

- a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan proses kaderisasi atau rekrutmen kader politik yang merupakan bagian dari fungsi partai politik bahwa partai politik mesti menerapkan pendekatan literasi politik dalam pembinaan kader politik sebab kader partai nantinya akan menjadi parameter keberhasilan partai politik dalam melaksanakan literasi politik itu sendiri. Literasi politik menjadi penting sebagai strategi atau model pembinaan kader di internal partai politik, sebab pada dasarnya kader politik adalah warga negara yang perlu pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan. Apabila pembinaan kader politik dengan literasi politik tidak dilakukan, maka dapat berdampak kepada persoalan yang dapat mempengaruhi kapabilitas kader partai sebagai tokoh politik masyarakat, idealisme kader partai yang kontra dengan ideologi partai, dan menurunnya kepercayaan

masyarakat terhadap kader partai, karena tidak kompeten dalam menjembatani aspirasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui, menggali, dan menganalisis tentang pembinaan kader politik melalui literasi politik yang dilakukan oleh partai Golkar Kabupaten Cianjur.

Metode

Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar Kabupaten Cianjur. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi. Proses wawancara dilakukan kepada beberapa subjek penelitian, di antaranya Sekjen, Wakil Sekjen, dan Staf DPD Golkar Kabupaten Cianjur yang dapat memberikan informasi yang relevan. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data yang meliputi Sekjen, Wakil sekjen, dan Staf DPD Golkar Kabupaten Cianjur.

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partai politik sebagai organisasi politik memiliki peranan penting dalam mencetak kader partai untuk menjadi tokoh politik yang kompeten dan memiliki wawasan global. Kader politik yang telah menjadi seorang tokoh politik bangsa tidak hanya mengedepankan orientasi kepentingan partai politik, melainkan mengutamakan bagaimana keberadaannya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Selain itu tidak semata-mata sebagai “*a group citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*” (Friedrich, 1967, hlm. 419) tetapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Lapalombara (2007, hlm. 3)

“...*This ubiquitous presence of the political party calls our attention to its instrumental value. Whatever else may be its functions, it appears to be a universally adopted tool for mobilizing large numbers of persons to engage in forms of political participation, voluntary or coerced, that are not limited to voting*”.

Untuk menjadi tokoh politik tersebut butuh proses pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan. Dalam struktur dan sistem politik bahwa yang bertanggung jawab dalam melahirkan tokoh politik berkualitas adalah partai politik. Untuk menyukseskan hal tersebut, maka perlu

dikembangkannya proses rekrutmen kaderisasi politik di internal partai politik yang terukur dan terarah. Dengan proses ini, maka partai politik dapat menilai karakteristik kader partai, baik dari segi intelektual, keterampilan komunikasi, dan *background* pendidikan kader yang sejalan dan seirama dengan ideologi partai.

Dalam konteks ini, calon kader partai yang memiliki kesamaan dengan ideologi partai yang dapat direkrut dan dikembangkan potensinya guna memperkuat dan mengembangkan partai politiknya. Partai Golkar Kabupaten Cianjur sebagai partai kader, memiliki kader yang terdistribusi di setiap kecamatan dan desa. Terdapat kader struktural dan kader ideologis. Kader struktural adalah kader yang telah memiliki kartu tanda anggota (KTA) dan terdaftar di *database* partai. Sedangkan kader ideologis adalah kader yang punya sikap politik militan terhadap partai Golkar yang punya persepsi bersama tentang cita-cita pembangunan melalui saluran politik partai. Kader politik tersebut adalah warga negara yang dengan sukarela turut berpartisipasi aktif menjadi kader untuk memberikan sumbangsih peran dan pemikiran dalam proses pengelolaan negara sebagaimana dikemukakan oleh W. Van Deth (2016, hlm. 3) bahwa

“...political participation concerns government, politics, or the state in broad senses of these words and is neither restricted to specific phases (such as parliamentary decision-making processes or executing laws), nor to specific levels or areas (such as national elections or contacts with party officials). Thus, any voluntary, nonprofessional activity concerning government, politics, or the state is a specimen of political participation”.

Hal tersebut diperkuat dengan gagasan Leighley (1990, hlm. 460) yang mengemukakan bahwa

“... theoretical assumption is that the more that individuals interact with others in the sociopolitical environment (i.e., join social groups or discuss politics with neighbors), the greater their exposure to social norms of political behavior as well as their knowledge of specific details about participation opportunities. Thus, including social interaction in models of political participation provides a more appropriate specification of what causes individuals to become involved in politics”.

Dalam iklim kehidupan partai politik perlu dikembangkannya pembinaan kader melalui literasi politik. Pembinaan tersebut tidak bersifat dari atasan ke bawahan seperti di perusahaan, melainkan dibina agar seirama dan sejalan dengan tujuan-tujuan partai Golkar Kabupaten Cianjur yang dapat mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan publik, maka pembinaan kader melalui literasi politik perlu dilakukan mengingat dengan literasi politik terjadi transfer

pengetahuan politik yang tidak hanya berkaitan dengan visi dan misi partai, tujuan pokok partai, serta strategi partai dalam pemenangan pemilu, melainkan berbagai hal penting yang berkaitan dengan permasalahan bangsa dan negara. Selain itu melalui literasi politik juga terjadi transfer keterampilan dan keahlian kader partai dalam berpolitik. Hal tersebut senada dengan Crick (2007, hlm. 246) bahwa *“political literacy was a term invented to mean that someone should have the knowledge, skills and values to be effective in public life”*. Gagasan tersebut diperkuat oleh Cassel dan Celia (1997, hlm. 328) bahwa

“political literacy is a product of both internal motivations and abilities, and external social roles. Political literacy results from political involvement that is caused by social position, ability, and parental socialization, and by these factors directly”.

Pada dasarnya pengetahuan dan keterampilan merupakan instrumen kemelek politikan warga negara ketika menyikapi dinamika politik dan isu-isu politik yang terjadi. Isu-isu politik tersebut dapat berupa bagaimana mekanisme pemilu eksekutif maupun legislatif berlangsung, bagaimana pemerintah bekerja dalam membuat kebijakan, dan persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Literasi politik dimaknai sebagai kemampuan warga negara untuk memenuhi kebutuhannya terhadap informasi politik dalam konteks lokal maupun nasional. Sifat daripada literasi politik ini tidak terbatas kepada kajian teks informasi, melainkan membentuk pola pikir warga negara yang literat atau melek terhadap politik. Selain itu dalam pandangan partai Golkar Kabupaten Cianjur bahwa literasi politik juga termasuk penguatan nilai-nilai dalam diri kader partai sebagai benteng Pancasila agar mampu menghapus stigma negatif yang telah tumbuh di masyarakat, misalnya politik dianggap saling makan memakan dan penyebaran informasi *hoax*. Senada dengan gagasan Zafer Kusa (2015, hlm. 197) bahwa

“political literacy cannot only be defined as knowing the political knowledge, but also skill and values. Skills require an affective participation in the social life; however, unless the individual is enabled to participate, these skill cannot be expected to develop”.

Kemudian literasi politik merupakan kegiatan kajian tentang politik yang membahas persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi kader partai pada khususnya yang dapat diaspirasikan melalui fraksi partai Golkar.

Bagi partai Golkar Kabupaten Cianjur literasi politik sangat penting dan strategis, karena

melalui literasi politik partai Golkar dapat mencipta SDM partai yang kompeten dimana para kader dapat memahami secara utuh tentang visi misi partai, tujuan pokok partai, dan peran partai sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Hopkins dan Coster (2019, hlm. 2) bahwa literasi politik berkaitan dengan

“how to make themselves effective in public life through knowledge, skills and values – what can be called ‘political literacy’, seeking for a term that is wider than political knowledge alone. The term ‘public life’ is used in its broadest sense to encompass realistic knowledge of and preparation and decision-making related to the main economic and social problems of the day”.

Pada dasarnya literasi politik mengacu kepada bagaimana dapat berperan secara efektif dalam kehidupan publik melalui pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dapat disebut sebagai literasi politik, menemukan istilah yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan politik saja. Istilah kehidupan publik digunakan dalam arti luas untuk mencakup pengetahuan dan persiapan serta pengambil keputusan yang realistis terkait dengan keutamaan persoalan ekonomi dan sosial saat ini.

Pelaksanaan literasi politik ini adalah satu fungsi partai politik untuk memberikan suatu pemahaman yang utuh terkait politik kepada kader partai, seperti pemahaman ihwal komunikasi politik. Komunikasi politik sangat penting bagi kader partai agar dapat mengomunikasikan dan mempublikasikan program unggulan partai kepada khalayak masyarakat, misalnya melalui sosialisasi. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008, 405-409) bahwa salah satu fungsi partai adalah

“... sarana komunikasi politik, yaitu partai politik bertindak sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia politik. Jika dilihat dari segi ini, tugas yang dimiliki partai politik adalah sebagai penyalur berbagai macam pendapat dan aspirasi dari masyarakat guna menghasilkan tujuan yang sama”.

Kemudian bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan di suatu tempat yang luas yang bisa diikuti oleh banyak masyarakat, sedangkan tidak langsung adalah melalui media sosial yang dapat menyasar kalangan generasi milenial. Senada dengan gagasan Wolfsfeld (2015, hlm. 3) bahwa *“in the digital age, people interested in politics have gained a new and powerful tool for both collecting political information and acting on it. For reasons detailed below, the social*

media have become an especially important part of these peoples’ digital tool box”.

Pada dasarnya literasi politik saat ini bukan hanya penting bagi kader partai, melainkan penting bagi masyarakat. Tujuan akhir dari literasi politik tidak lain adalah tingkat melek politik dan partisipasi publik menjadi meningkat. Partisipasi politik menjadi salah satu prinsip mendasar dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Segala keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang menyangkut kehidupan warga negara. "Kemelekpolitikan" masyarakat melalui partisipasi politik berhak menentukan keputusan politik yang diambil. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Hartleb (2017, hlm. 304) bahwa

“One of the features of democracies is that citizens are provided with a lot of opportunities for their interests to be incorporated into the political process. As well as participating in elections, they can, among other things, work for political parties, take part in civic initiatives, sign petitions, boycott certain products for political reasons, participate in demonstrations, donate money to political organisations, take part in civil disobedience or run for public office”.

Walaupun literasi politik tidak terbatas membahas perihal isu-isu politik yang terjadi dalam sebuah negara. Penguatan literasi politik kader partai merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara kontinuitas sejalan dengan dinamika politik yang sedang berkembang. Hal tersebut dimaksudkan bahwa literasi politik dapat dianggap sebagai strategi pembinaan bagi kader partai yang tentu saja akan mewarnai dan menentukan eksistensi serta maju mundurnya partai politik sebagai komunitas politik warga negara. Berkaitan dengan urgensi pembinaan kader politik melalui literasi politik perlu mengacu kepada gagasan Rosyidin (2017, hlm. 8) yang mengemukakan bahwa *“literasi politik umumnya berkaitan dengan tiga kemampuan atau keterampilan, yaitu keterampilan kognitif (cognitive skill), afektif (affective skill), dan konatif atau psikomotorik. Kognitif terkait dengan pengetahuan warga mengenai hal ihwal politik dan segala hal yang terkait. Afektif lebih menonjolkan aspek emosi atau perasaan, seperti simpati, empati politik dan sebagainya. Konatif atau psikomotorik berhubungan dengan bagaimana warga mahir melakukan praktik-praktik yang demokratis”.* Selain itu Heryanto (2011, hlm. 194-195) mengemukakan terkait urgensi kegiatan literasi politik dilakukan *“pertama, kegiatan literasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam penguatan dan pemberdayaan politik warga negara, terutama*

dalam mendedukasi hak-hak politik warga negara sehingga memahami benar posisinya di antara berbagai kekuatan politik yang ada. *Kedua*, kegiatan literasi politik kerap direduksi oleh berbagai faktor antara lain desain institusional serta tipe kekuasaan eksekutif, kontestasi pada kekuasaan legislatif, kartelisasi politik dan praktik demokrasi kolusif, serta menguatnya distorsi politik media. *Ketiga*, literasi politik itu bukanlah sebatas wacana (*discourse*). Melainkan, perpaduan antara pengetahuan yang memadai, keterampilan dalam pencarian dan komparasi informasi politik, sekaligus juga sikap politik mereka terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.“

Simpulan

Terdapat urgensi pembinaan kader politik melalui literasi politik, yaitu sebagai salah satu fungsi partai untuk memberikan suatu pemahaman yang utuh terkait kapasitas politik kader partai, seperti pemahaman ihwal komunikasi politik. Selain itu sebagai kajian tentang politik yang membahas persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi kader partai pada khususnya. Selanjutnya sebagai strategi pembinaan kader partai politik yang tentu saja akan mewarnai dan menentukan eksistensi maju mundurnya partai politik sebagai komunitas politik warga negara.

Referensi

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cassel, C. A., & Celia, C. L. (1997). Theories of Political Literacy. *Journal Behavior*, 19 (4), 317-335
- Crick, B. (2007). Citizenship: The Political and The Democratic. *British Journal of Education Studies*, 3 (55), 235-248
- Friedrich, Carl J. (1967). *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Waltham: Mass Blaisdell Publishing Company.
- Hartleb, F. (2017). Political Participation Today: a Radical Shift, but with a Positive or Negative Outcome?, *Journal European View*, 16 (2), 303-311
- Heryanto, G. (2011). *Dinamika Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Lasswell Visitama
- Hopkins, N., & Will Coster. (2019). The Levellers, Political Literacy and Contemporary Citizenship Education in England. *Journal Education, Citizenship and Social Justice*, hlm. 1-14
- Deth, J. W. V. (2016). What is Political Participation?. *Journal Political Behavior and Political Socialization*. Doi: <https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc171>
- Lapalombara, J. (2007). Reflections on Political and Political Development, Four Decades Later. *Journal of Party Politics*, 13 (2), 114-154
- Leighley, J. E. (1990). Social Interaction and Contextual Influences on Political Participation. *Journal American Politics Quarterly*, 18 (4), 459-475
- Rosit M., dan Nurul Hidayat. (2019). *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Rosyidin, I. (2017). “Pemilu Serentak dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi: Perlunya Upaya Literasi Politik“. Dalam Sahid Gatara dan Nurjaman (penyunting), *Prosiding Seminar Nasional Apsipol*. Makasar: Universitas Hasanuddin
- Septiawan, I. dan Winarno. (2017). Strategi Kader Partai Politik dalam Pendidikan Politik bagi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Keterampilan Kewarganegaraan. *Jurnal Educitizen*, 2 (1), 118-129
- Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasim, M., Nuryanti, S., Yanuarti, S., Tryatmoko, M. W., & Budiatri, A. P. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*. Jakarta: KPK–LIPI.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Wolfsfeld, G., dkk. (2015). Political Information Reportoires and Political Participation. *Journal of New Media and Society*, 18 (9), 1-20
- Zafer, K. (2015). Political Literacy Status of Pre-Service Social Studies Teacher. *Journal Social and Behavioral Science*, hlm. 197-202